

## **Analisis Open Government Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru**

**Rani Gusfira Zulfa<sup>1</sup>, Syed Agung Afandi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia  
ranigz2708@gmail.com<sup>1</sup>, Syedagungafandi@uin-suska.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of open government in the Department of Population and Civil Registration of Pekanbaru City. This is based on the reason that the implementation of open government is the responsibility of the government so that it can provide excellent service to the wider community. Disdukcapil Pekanbaru City received an award from the Ministry of PAN-RB as an agency with excellent service and supported by an award from the Mayor of Pekanbaru as the most innovative agency 1. This research is a qualitative research with primary and secondary data sources. The subjects in this study used a purposive sampling technique by assigning 6 informants consisting of several fields in the Pekanbaru City Disdukcapil and the community providing services. The results of this study indicate that the implementation of open government in Disdukcapil has been implemented well in terms of transparency, participation and collaboration. However, there are still obstacles in the field of communication and information technology, where there are still ordinary people who will use the innovations launched and it is important for the agency to carry out maximum education.*

### **Keywords:**

Open Government  
Disdukcapil  
Pekanbaru

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan open government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa penerapan open government ini menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara luas. Disdukcapil Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN-RB sebagai instansi dengan pelayanan prima dan didukung oleh penghargaan dari Walikota Pekanbaru sebagai instansi terinovatif 1. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data dalam bentuk primer dan sekunder. Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan 6 orang narasumber yang terdiri dari beberapa bidang di Disdukcapil Kota Pekanbaru dan masyarakat yang melakukan pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan open government di Disdukcapil telah terlaksana secara baik dari segi transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Namun masih terdapat kendala dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi, di mana masih terdapat masyarakat yang awam akan penggunaan inovasi yang di luncurkan dan penting bagi dinas untuk melakukan edukasi secara maksimal.

### **Corresponding Author:**

Rani Gusfira Zulfa  
Administrasi Negara  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
ranigz2708@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

*Open government* merupakan akselerator dalam gagasan inisiatif pada *memorandum on transparency and open government* yang digagas oleh Pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 2009 (Aarshi et al., 2018). Kekuatan ini bertujuan untuk mendukung transparansi di seluruh bidang, kolaborasi massal, dan berperilaku bukan sebagai bidang yurisdiksi yang terisolasi tetapi sebagai sesuatu yang baru, organisasi yang benar-benar terintegrasi dan berjaring (M. Afandi & Afandi, 2018c; S. A. Afandi, Afandi, & Erdayani, 2022). Organisasi atau inisiatif publik ini telah mencoba untuk mencapai keterbukaan yang lebih besar dengan memfokuskan upaya kebijakan pada manfaat tertentu dalam hal transparansi dan partisipasi. Dua hal yang akan menciptakan sebuah kolaborasi yaitu ketika transparansi dan partisipasi telah mampu diwujudkan dan dioptimalkan maka pemerintahan mampu mengembangkan sayapnya kepada hal yang lebih besar lagi. Sebagai bentuk afirmasi bahwasanya dunia sekarang adalah dunia yang mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi ke depannya dengan aspek transparansi, partisipasi dan kolaborasi (M. Afandi & Afandi, 2019; S. A. Afandi et al., 2021; Wirtz et al., 2018).

Arah *open government* menjadi bentuk inisiatif untuk menghilangkan kesalahpahaman masyarakat terhadap informasi publik. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga arah berbeda yang mengarah pada penerapan *open government* (M. Afandi & Afandi, 2018a, 2018b; Cingolani, 2021). Arah pertama dan landasan utama didasarkan pada gagasan Kebebasan Informasi. Dokumen pemerintah harus tersedia untuk siapa saja. Namun tampaknya karena Perang Dingin, ini tidak mungkin dan kerahasiaan pemerintah tetap ada. Arah utama ini difokuskan pada hak hukum yang dimiliki warga negara untuk mengakses informasi pemerintah. Informasi seperti ini yang dihasilkan oleh administrasi publik harus dianggap sebagai bagian dari domain publik.

Arah kedua adalah ranah administrasi publik sebagai alat informasi publik. Dalam arah ini, keterbukaan harus diartikan sebagai pencarian untuk mendeklasifikasi informasi dan pengelolaan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan publik dan pengadaan informasi atau deregulasi. Dengan pengertian yang lebih operatif dan regulasi, jalur ini mengoperasionalkan gagasan *Open Government* dalam organisasi publiknya. Arah ketiga adalah informasi yang mendetail, di mana dalam memahami gagasan *Open Government* penting adanya keterbukaan masukkan atau data yang digunakan untuk pejabat pemerintah namun masih bisa diakses oleh warga negara. Ketiga arah ini berusaha mencapai transparansi sebagai tujuan utama. Proses transparansi seharusnya mengarah pada pemerintahan yang lebih baik dan kinerja pemerintahan yang dapat dilihat oleh masyarakat. Gagasan yang mengatakan bahwa legitimasi otoritas publik ada di beberapa bagian salah satunya pada transparansi.

Gerakan *Open Government* mulai di Indonesia juga telah direspons oleh Pemerintah Indonesia dengan bentuk *Open Government Indonesia (OGI)* yang hadir pada tahun 2011 (S. A. Afandi, Afandi, & Erdayani, 2022). Penerapan *Open government* ini menjadi tanggung jawab yang penuh berisi tantangan oleh Kementerian PAN-RB dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik atau regulasi dari lembaga pemerintah (M. Afandi & Afandi, 2018b; Lestari et al., 2022; Wirtz et al., 2018). Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dalam rangka meningkatkan *open government* adalah menyelenggarakan ajang penyampaian evaluasi publik di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 ajang tersebut terdapat 84 kementerian atau Lembaga, 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang berpartisipasi. Penilaian hasil evaluasi tersebut terdiri dari enam aspek yang sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PAN RB No. 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Hasil penilaian pada ajang tersebut dalam kategori pelayanan prima dari 84 Kementerian terdapat 17 Kementerian mendapatkan predikat A, 30 Kementerian mendapatkan predikat A-, 25 Kementerian mendapatkan predikat B, 10 Kementerian mendapatkan predikat B-, dan 2 Kementerian mendapatkan predikat C. Pemerintahan daerah yang mendapatkan peringkat A terdiri 2 pemerintahan provinsi dan 9 pemerintahan kabupaten atau kota. Salah satu dari 9 pemerintahan kabupaten/kota tersebut adalah akumulasi skor dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 461 tahun 2022 tentang Penetapan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru meraih peringkat pertama perangkat daerah terinovatif dengan skor 2.434,8 dan total 25 inovasi digital sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dalam peringkat ketujuh dengan skor perolehan 686,4 dengan total 10 inovasi digital (S. agung Afandi et al., 2023).

Hal ini menjadi kesenjangan yang terdapat dalam suatu instansi, terhadap tumbuh kembangnya suatu inovasi pelayanan yang bermuara kepada masyarakat. Pada dasarnya fundamental keberhasilan pemerintah dalam melakukan pelayanan adalah kepuasan dari masyarakat yang sesuai dengan amanat

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengatakan terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik (S. A. Afandi, Erdayani, Afandi, et al., 2022; Erdayani et al., 2022). Dengan demikian keberhasilan yang di raih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam rangka penerapan *open government* ini penting untuk dibahas lebih dalam bagaimana upaya yang dilakukan pihak dinas dalam penerapan *open government* ini sehingga mampu mencapai tujuan dari kementerian PAN-RB dalam rangka mendigitalisasi seluruh dinas yang ada dan mampu di replikasi oleh dinas lainnya serta juga menjadi pendorong dalam menciptakan perubahan yang inklusif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan indikator transparansi, partisipasi dan kolaborasi. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Informan penelitian di tentukan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan data sekunder penelitian ini bersumber dari dokumen dan jurnal. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. PEMBAHASAN

*Open government* tidak menjadi bermakna apabila transparansi tidak terlaksana dengan baik. Dalam bentuk transparansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah membuka akses seluas luasnya kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya bentuk *open information data* yang disediakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru sebagai wujud pelaksanaan pelayanan yang baik, sehingga dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Seperti masyarakat tidak harus lagi datang ke kantor untuk melakukan pelayanan karena berbagai informasi dan proses dapat dilakukan secara online selain itu juga terdapat situs lacak berkas yang membuat masyarakat dapat melihat status dari pelayanan yang mereka lakukan. Kemajuan ini tentu juga dipengaruhi oleh *skill* dari *government* tersebut yang memberikan nilai pelayanan terbaik kepada masyarakat.

*Skill government* menjadi penilaian yang mendasar dalam mendapatkan nilai maksimal dari suatu instansi. Ketika kepuasan masyarakat rendah maka penilaian ini akan berpengaruh terhadap kinerja instansi dimata nasional. Dalam meraih predikat terbaik maka perlu juga memaksimalkan kemampuan pegawai dalam menangani setiap masalah yang ada dengan baik dan tidak angkuh. Bentuk tanggung jawab, aman, sopan dan santun pegawai tidak mampu lagi untuk dimanipulasi karena pada disdukcapil telah mengupayakan sistem berbasis elektronik. Tanpa adanya intervensi dalam memberikan nilai kepada pegawai, maka pegawai harus siap dalam memberikan pelayanan.

Tabel 1.  
Indeks Kepuasan Masyarakat

| No. | Inovasi              | Responden | SKM % | Kemampuan % | Tanggung jawab % |
|-----|----------------------|-----------|-------|-------------|------------------|
| 1.  | Sinopsis             | 201       | 91.53 | 92.29       | 90.55            |
| 2.  | Sipintar             | 149       | 91.05 | 93.96       | 89.26            |
| 3.  | Menwa                | 225       | 92.48 | 92.56       | 91.44            |
| 4.  | Bamsos               | 239       | 93.68 | 92.68       | 92.99            |
| 5.  | Akapela              | 234       | 95.86 | 96.15       | 95.37            |
| 6.  | Lagu                 | 440       | 91.56 | 90.91       | 91.31            |
| 7.  | Kamus sekolah        | 211       | 95.23 | 96.09       | 94.91            |
| 8.  | Kenali aksi dukcapil | 220       | 97.02 | 97.73       | 96.70            |
| 9.  | Mas rapid            | 220       | 97.02 | 97.73       | 96.70            |
| 10. | Kiasan               | 210       | 97.32 | 97.38       | 97.62            |
| 11. | Pandawa              | 211       | 96.68 | 96.45       | 95.85            |
| 12. | Peduli               | 219       | 95.17 | 93.72       | 92.81            |
| 13. | Kado camer           | 230       | 95.98 | 95.33       | 94.24            |
| 14. | Lakon                | 215       | 95.06 | 95.12       | 92.33            |
| 15. | Pelita 1             | 215       | 96.96 | 96.40       | 96.16            |
| 16. | Pelita 2             | 219       | 98.67 | 98.63       | 98.17            |
| 17. | Pelita 3             | 209       | 95.36 | 95.81       | 95.57            |
| 18. | Pelita 4             | 220       | 96.62 | 95          | 94.89            |
| 19. | Pelitada             | 220       | 95.08 | 93.30       | 93.81            |
| 20. | Batuta               | 208       | 96.03 | 95.19       | 95.43            |

|     |                  |      |       |       |       |
|-----|------------------|------|-------|-------|-------|
| 21. | Jasa dukcapil    | 209  | 94.28 | 92.28 | 93.18 |
| 22. | Portal web       | 206  | 91.27 | 91.99 | 91.50 |
| 23. | Sipenduduk       | 220  | 96.72 | 96.24 | 96.24 |
| 24. | Survey kerjasama | 101  | 82.01 | 81.19 | 82.67 |
| 25. | Servey web       | 7290 | 88.62 | 89.33 | 88.01 |
| 26. | Cendekia         | 1515 | 90.13 | 83.88 | 89.11 |
| 27. | Simanja          | 241  | 97.54 | 97.93 | 97.82 |
| 28. | Jasa teman       | 220  | 93.86 | 95    | 93.52 |
| 29. | Petua lawas      | 208  | 89.92 | 90.26 | 90.63 |
| 30. | Pentas Kita      | 201  | 98.63 | 98.88 | 98.63 |
| 31. | Lado Pku         | 212  | 98.30 | 98.58 | 98.35 |
| 32. | Pedang biru      | 297  | 95.47 | 95.79 | 95.12 |

Berdasarkan tabel tersebut yang merupakan hasil olahan pada 23 Desember 2022, pukul 15.53 WIB, dapat diketahui bahwa indeks pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik. Pada dasarnya kepuasan dari masyarakat juga dipengaruhi oleh kemampuan dari pemberi pelayanan yang baik, sopan, ramah dan tamah.

Dari segi partisipasi yang merupakan bentuk pelibatan masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam menempuh kebijakan atau inovasi yang ada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menjawab berbagai keluhan dari masyarakat dengan baik atas hasil dari aspirasi masyarakat. Partisipasi menjadi tanggung jawab bagi instansi dalam bentuk membuat kebijakan di antaranya konsultasi dan co-decision. Konsultasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berbentuk konsultasi secara online maupun konsultasi secara manual.

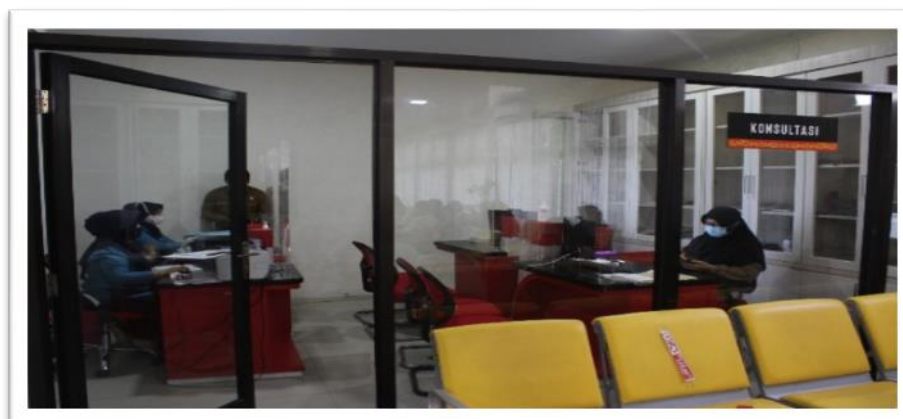
Gambar 1.

Layanan Konsultasi Online



Konsultasi secara *online* terjadi karena menjawab keresahan dari masyarakat yang lama menunggu antrean yang padat, yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Maka pihak instansi menyediakan layanan secara *online* agar hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat dapat diatasi secara baik. Namun hal ini masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat kota Pekanbaru yang berjumlah 1,074,989 Jiwa pada tahun 2021 dengan wajib KTP sebesar 762,487 jiwa. Masyarakat yang awam terhadap teknologi juga tetap diberikan kemudahan yang sama dengan yang lainnya yaitu adanya konsultasi secara *offline* atau manual.

Gambar 2.  
Ruangan Konsultasi Manual

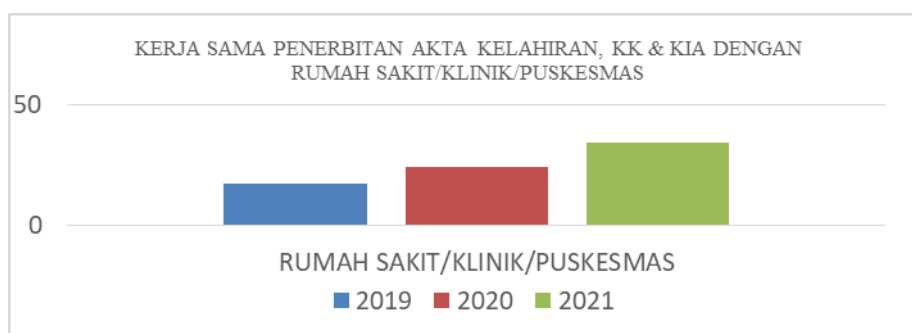


Gambar di atas merupakan bentuk dari adanya konsultasi yang dilakukan secara manual. Kebutuhan ini berada pada masyarakat yang sulit dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ruangan konsultasi manual ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat dalam melakukan semua kewajibannya terkait kependudukan dan catatan sipil. Dengan ini mendorong angka partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan berbasis kepada masyarakat.

Dalam ranah *co-decision* pihak dinas melakukan pengambilan keputusan secara sistematis. Pengambilan keputusan dilakukan 2 atau 3 kali dalam sebulan. *Co-decision* juga berorientasi kepada bidang yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Namun Ketika adanya agenda yang mendesak dan mengharuskan untuk melaksanakan rapat pihak dinas juga melakukan diskusi melalui *WhatsApp* Grup sesuai dengan bidang yang terkait.

*Co-decision* dalam internal dinas akan menembus batasan dalam menjalin Kerjasama dengan pihak eksternalnya. Kerjasama menjadi muara bersama dalam mencapai tujuan yang sama. Kerjasama yang melibatkan masyarakat, swasta dan pemerintah atau yang dikenal dengan *collaborative governance*. *Collaborative governance* yang dilakukan oleh disdukcapil Kota Pekanbaru adalah dengan melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dengan rumpun bidang yang berbeda. Memiliki Visi untuk terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, cepat, dan akurat. Dengan slogan SIAP Melayani (Santun Inovatif Akuntabel Profesional).

Gambar 3.  
Kerjasama Disdukcapil



Gambar di atas merupakan bentuk *collaborative governance* yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat pada tahun 2019 hingga 2021. Kerjasama tersebut juga di dukung oleh Keputusan Walikota Pekanbaru No. 102 tahun 2021 tentang Kerjasama Penerbitan Akta Kematian di mana dalam melakukan pelayanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam rangka penerbitan akta kematian bagi penduduk Kota Pekanbaru dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit, juru kunci penjaga makan dan krematorium yang dilakukan secara terintegrasi. Kerjasama ini merupakan bentuk pemenuhan kepentingan antar instansi yang berarti bahwasanya Kerjasama adalah kunci kesuksesan dari suatu perilaku dari setiap kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama.

Pentingnya Kerjasama dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat ketika adanya inovasi ataupun kebijakan yang dilahirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sehingga pihak

dinas mampu mengevaluasi dari inovasi ataupun kebijakan yang dilahirkan tersebut. Di mana pada Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan forum diskusi publik yang melibatkan para RT/RW atau yang mewakili kota Pekanbaru di mana tujuannya untuk mendengarkan aspirasi maupun keluhan yang di rasakan oleh setiap masyarakat yang ada di daerah masing-masing terhadap kependudukan dan pencatatan sipil.

Selain itu dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi pihak dinas juga melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemakaian *hardisk*. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah hanya 1 TB yang berada dalam posisi tidak mencukupi kebutuhan data dari dinas sendiri. Maka Kerjasama ini melahirkan keuntungan yang imbang antara pihak dinas dan pihak ketiga sehingga semua data dan informasi masyarakat dapat tersimpan secara baik.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Open Government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah dilakukan dengan baik dalam bentuk transparansi, partisipasi dan kolaborasinya. Hasil ini juga sejalan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mulai dari penghargaan yang diperoleh dari Kementerian PAN-RB sebagai instansi pelayanan prima dan penghargaan yang diperoleh dari Walikota Pekanbaru sebagai dinas terinovatif Kota Pekanbaru pada tahun 2021. Namun dalam proses peningkatan open government dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru masih mengalami kesulitan dalam hal teknologi yang dihadapi masyarakat. Masyarakat masih mengalami kebingungan dalam penggunaannya sehingga hal ini menjadi penghambat penerapan open government secara maksimal. Dengan demikian ini menjadi tanggung jawab dari pihak dinas dalam meningkatkan sosialisasi dalam penggunaan teknologi sehingga inovasi yang di lahirkan berjalan secara baik.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### REFERENSI

- Aarshi, S., Malik, B. H., Habib, F., Ashfaq, K., Saleem, I., & Tariq, U. (2018). Dimensions of open government data web portals: A case of Asian countries. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 9(6), 459–469.
- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018a). Budget Transparency on Kebumen Regency Government Website in 2013-2017. *International Conference on Informatics for Development*, 23–27.
- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018b). Implementation of E-Government As Mediatransparency of Local Government Budget Management in Riau Province. *State and Digital Society*, 135–143.
- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018c). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Tunas Gemilang.
- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2019). E-Government and Budget Transparency of Indragiri Hulu Government. *International Conference on Contemporary Social and Political Affairs*, 75–79.
- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. Bintang Semesta Media.
- Afandi, S. A., Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, N. H. (2022). Pekanbaru Mayoral Election 2024 : Critical Discourse Analysis Review. *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 29–47.
- Afandi, S. A., Lestari, R., & Afandi, M. (2021). Collaborative Govenance in Preserving the Malay Culture of Riau. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(2), 483.
- Afandi, S. agung, Afandi, M., Erdayani, R., & Lestari, R. (2023). Mapping study: Analysis of the Riau vision 2025 research. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 12(4).
- Cingolani, L. (2021). The Survival of Open Government Platforms: Empirical Insights from a Global Sample. *Government Information Quarterly*, 38(1).
- Erdayani, R., Afandi, S. A., Afandi, M., Aswad, H., & Afandi, N. H. (2022). Political Competition in Riau: A Review of Critical Discourse Analysis. *Jurnal El-Riyasah*, 13(1).
- Lestari, R., Nugroho, R., Juwandi, J., & Afandi, S. A. (2022). Stakeholder Analysis Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Riau. *Jurnal Academia Praja*, 5(2), 250–261.
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Rösch, M. (2018). Citizen and Open Government: An Empirical Analysis of Antecedents of Open Government Data. *International Journal of Public Administration*, 41(4), 308–320.